



RENCANA KERJA (RENJA)



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BKAD)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya akhirnya Renja RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 telah terselesaikan. maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

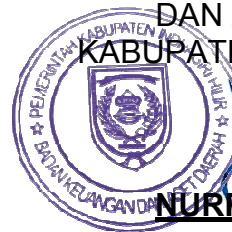
Renja RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 bertujuan secara umum sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renja RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 masih banyak keterbatasan sehingga dibutuhkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, semoga dokumen Renja RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dapat menjadi pedoman awal bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Indragiri Hilir, 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



NURRAHMAN, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19791223 199905 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	12
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	16
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	20
BAB. V PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024.
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

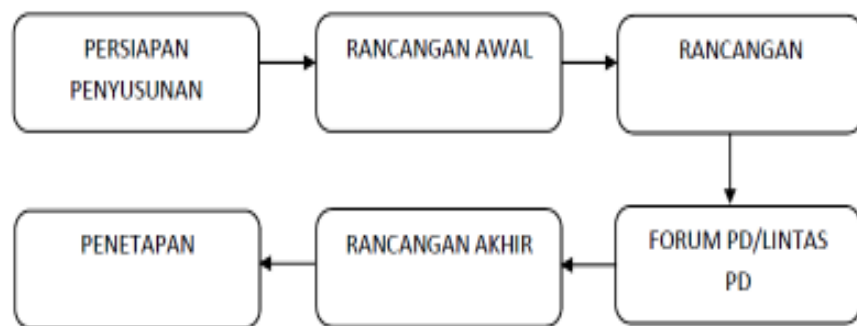
Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

- 1) Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2022, pengendalian kegiatan tahun 2023 , dan RKPD 2024)
- 2) Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana dan pengampu kepentingan.
 - Desk dengan pengampu kegiatan

- 3) Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi dan Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
- 4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : DPRD, OPD terkait, Perguruan Tinggi , dan Pemangku Kepentingan yang terkait lainnya
- 5) Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan Dokumen
- 6) Penetapan

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah penjabaran dari Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2024 – 2026 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir 2024

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.
- 2) Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708/2020 tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagai acuan dan tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 yang sesuai tugas, pokok, dan fungsi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1 Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024;
- 2 Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Renja tahun 2022 dan Renstra hingga tahun 2023;
- 3 Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD BKAD Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan untuk :

- 1) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- 2) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- 3) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakto-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2023 dan perkiraan target Tahun 2024.

Pada Tahun 2023 Total Anggaran BKAD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar RP. 368.051.095.861 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 27.600.032.840,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.536.200.000,- dan Belanja Tidak Terduga sebesar RP. 27.809.174.566,- dan Belanja Transfer sebesar Rp. 311.105.688.475,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program dan 13 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. capaian kinerja pada tahun berjalan terealisasi sebesar RP. 141.736.373.668,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 38.51 %.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan pencapaian Renstra BKAD Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program, kegiatan dan Sub kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Kegiatan/sub kegiatan) s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2022			Target program ,Kegiatan, Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	19	19	19	19	100	19	57	300
5.02.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Dokren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun.	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	72	72	72	72	100	72	216	300
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	1	1	1	1	100	1	3	300
5.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	60	60	60	60	100	60	180	300
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	100	0	100	100	100	100	200	200
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	34	0	0	0	0	34	34	100

5.02.02.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang dilaksanakan	29	29	29	29	100	29	87	300
5.02.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) yang disusun	24	24	24	24	100	24	72	300
5.02.02.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Realisasi Pengeluaran Kas berdasarkan SP2D yang dapat diselenggarakan	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.02.02.010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	100	2	2	2	100	100	104	104
5.02.02.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran yang disusun	4	4	4	4	100	4	12	300
5.02.02.02.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.02.02.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang disusun	4	4	4	4	100	4	12	300

5.02.02.02.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun	1	1	1	1	100	1	3	300
5.02.02.02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah persentase anggaran Subsidi terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	0	100	0	0	0	0	100	0
5.02.02.02.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah persentase anggaran dana desa dan alokasi dana desa terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah persentase anggaran dana darurat dan mendesak terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.04.010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah persentase anggaran dana bagi hasil terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang diimplementasikan dan terpelihara	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	90	80	80	80	100	90	250	277,78
5.02.03.02.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.03.02.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah yang disusun	2	2	2	2	100	2	6	300

5.02.03.02.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diinventarisasi	10	10	10	10	100	10	30	300
5.02.03.02.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	terlaksananya pengamanan barang milik daerah	4	4	4	4	100	4	12	300
5.02.03.02.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang dioptimalisasikan	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.03.02.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan barang milik daerah yang disusun	10	10	10	10	100	10	30	300
5.02.03.02.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	3	3	3	3	100	3	9	300

Pelaksanaan Renja sebagian besar terlaksana sesuai output yang diharapkan. Jika dilihat dari serapan anggaran, ada beberapa kegiatan yang perlu diefektifkan. Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengelolaan Keuangan dalam hal Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan tambahan pengetahuan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah mengingat tidak semua aparatur memiliki latar belakang Pengelolaan Keuangan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja diatas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 3 Program. Target kinerja program meliputi:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD memiliki 12 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/ kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;

- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai posisi strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala BKAD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini mempunyai tugas antara lain :

- 1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- 2) mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- 3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- 4) menetapkan SPD;
- 5) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
dan
- 6) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut, serta menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD/ Perubahan APBD, diarahkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi utamanya ekonomi berbasis kreatifitas (ekonomi kreatif), lingkungan hidup, kemiskinan serta pengangguran, Unit Reaksi Cepat (URC) pendampingan pengelolaan keuangan kabupaten/kota, Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai dan isu-isu strategis lainnya, yang dijabarkan dalam program kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai bidang urusan, kebutuhan dan karakter daerah masing-masing. dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, antara lain :

- a. Posisi strategis BKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang antara lain melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta selaku Perangkat Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ;
- b. Posisi strategis B K A D antara lain melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD, rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah. Untuk itu, BKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

- d. Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan dan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BKAD Kabupaten Indragiri Hilir dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

- 1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (Kelemahan)

- 1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Opportunity (Peluang)

- 1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (*e-government*) di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

4. Treath (Ancaman)

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
- 2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
- 3) Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap Perangkat Daerah.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- 5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.
- 6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BKAD Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntansi berbasis akrual;
3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis teknologi informasi;
4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang;
6. Pelayanan prima;
7. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemenuhan SDM yang handal sesuai tuntutan kebutuhan;
8. Integrasi e-planning dan e-budgeting;
9. Integrasi Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Pengintegrasian Standar Satuan Harga dan Satuan Harga Online.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Inhil	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>	Persen	100	20.639.628.000,00	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Inhil	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>	Perse n	100	20.639.628.000,00			
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Inhil	<i>Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun</i>	Persen	100	65.584.000,00	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Inhil	<i>Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun</i>	Perse n	100	65.584.000,00		
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Inhil	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Dokumen	2	27.992.000,00	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Inhil	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Doku men	2	27.992.000,00	
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Inhil	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Laporan	1	37.592.000,00	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Inhil	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Lapor an	1	37.592.000,00	
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Inhil	<i>Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar</i>	Persen	100	11.753.982.000,00	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Inhil	<i>Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar</i>	Perse n	100	11.753.982.000,00		
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Inhil	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang/bulan	64	11.731.492.000,00	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Inhil	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang /bula n	64	11.731.492.000,00	
		1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Inhil	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	Laporan	60	22.490.000,00	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Inhil	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	Lapor an	60	22.490.000,00	
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Inhil	<i>Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi</i>	Persen	100	393.607.300,00	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Inhil	<i>Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi</i>	Perse n	100	393.607.300,00		

		1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Inhil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	271.920.000,00			1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Inhil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	271.920.000,00
		1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Inhil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	121.687.300,00			1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Inhil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	121.687.300,00
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Inhil	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	3.084.725.000,00		1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Inhil	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	3.084.725.000,00
		1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	114.500.000,00			1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	114.500.000,00
		1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	500.240.000,00			1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	500.240.000,00
		1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Inhil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	104.350.000,00			1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Inhil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	104.350.000,00
		1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	349.500.000,00			1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	349.500.000,00
		1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Inhil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	76.000.000,00			1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Inhil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	76.000.000,00
		1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3200	30.000.000,00			1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3200	30.000.000,00
		1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.910.135.000,00			1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.910.135.000,00
	1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Inhil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	105.350.000,00		1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Inhil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	105.350.000,00
		1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	105.350.000,00			1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	105.350.000,00
	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Inhil	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	662.746.000,00		1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Inhil	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen	100	662.746.000,00
		1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	21.950.000,00			1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	21.950.000,00
		1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	248.000.000,00			1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	248.000.000,00

	1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	392.796.000,00		1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	392.796.000,00
	1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Inhil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	4.573.633.700,00		1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Inhil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Perse n	100	4.573.633.700,00
	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	1.959.150.100,00		1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	1.959.150.100,00
	1.7.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	2.031.294.600,00		1.7.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	2.031.294.600,00
	1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	206.189.000,00		1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	206.189.000,00
	1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	158	377.000.000,00		1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	158	377.000.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Kab. Inhil	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100	358.371.103.682,00	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Kab. Inhil	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Perse n	100	358.371.103.682,00
	2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Inhil	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persen	100	2.362.404.950,00		2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Inhil	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perse n	100	2.362.404.950,00
	2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	158.852.000,00		2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Doku men	2	158.852.000,00
	2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	157.023.000,00		2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Doku men	2	157.023.000,00
	2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Inhil	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	8	1.125.170.650,00		2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Inhil	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Doku men	8	1.125.170.650,00
	2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Inhil	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	556.674.300,00		2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Inhil	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Doku men	2	556.674.300,00
	2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	5	364.685.000,00		2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Doku men	5	364.685.000,00
	2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Inhil	Persentase Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Belanja dan Pembiayaan Daerah di Dalam APBD	Persen	100	2.466.992.482,00		2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Inhil	Persentase Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Belanja dan Pembiayaan Daerah di Dalam APBD	Perse n	100	2.466.992.482,00

		2.2.1	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	29	456.254.000,00			2.2.1	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	29	456.254.000,00
		2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	24	665.259.982,00			2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	24	665.259.982,00
		2.2.3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2	576.173.000,00			2.2.3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2	576.173.000,00
		2.2.4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Inhil	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	769.305.500,00			2.2.4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Inhil	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	769.305.500,00
	2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Inhil	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	100	2.701.383.350,00			2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Inhil	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Perse n	100	2.701.383.350,00
		2.3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	4	307.339.500,00			2.3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	4	307.339.500,00
		2.3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	1.416.009.450,00			2.3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	1.416.009.450,00

		2.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	4	699.593.000,00			2.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	4	699.593.000,00
		2.3.4	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	278.441.400,00			2.3.4	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	278.441.400,00
	2.4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Inhil	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	100	350.194.000.000,00		2.4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Inhil	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Perse	100	350.194.000.000,00
		2.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	294.843.000.000,00			2.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	294.843.000.000,00
		2.4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	50.000.000.000,00			2.4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	50.000.000.000,00
		2.4.3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	5.351.000.000,00			2.4.3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	5.351.000.000,00
	2.5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Inhil	Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikelola	Persen	100	646.322.900,00		2.5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Inhil	Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikelola	Perse	100	646.322.900,00
		2.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	646.322.900,00			2.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	646.322.900,00
	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Inhil	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Persen	100	4.297.107.318,00		3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Inhil	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Perse	100	4.297.107.318,00
		3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	Persentase Rekonsiliasi Pemutakhiran Pencatatan dan Pelaporan BMD	Persen	100	4.297.107.318,00		3.1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	Persentase Rekonsiliasi Pemutakhiran Pencatatan dan Pelaporan BMD	Perse	100	4.297.107.318,00
		3.1.1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	554.482.400,00			3.1.1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	554.482.400,00
		3.1.2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	10	422.729.200,00			3.1.2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	10	422.729.200,00
		3.1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	4	1.454.697.648,00			3.1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	4	1.454.697.648,00

			3.1.4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	Dokumen	2	594.287.500,00			3.1.4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	Dokumen	2	594.287.500,00
			3.1.5	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	Laporan	10	993.847.300,00			3.1.5	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	Laporan	10	993.847.300,00
			3.1.6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Orang	3	277.063.270,00			3.1.6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Orang	3	277.063.270,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BKAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dalam menjalankan visi dan misi Bupati Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program . . . 1.1 Kegiatan . . . 1.1.1 Sub Kegiatan . . . 1.1.2 Sub Kegiatan . . . 1.1.3 Sub Kegiatan . . . 1.1.4 Sub Kegiatan . . . 1.1.5 Sub Kegiatan . . . Dst . . .		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, adalah:

- Terjaganya kesinambungan fiskal;
- Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
- Pembangunan sistem penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
- Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah;
- Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
- Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
- Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan kelembagaan.

Sedangkan kebijakan dalam RPJMD yang ingin ditetapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Visi dan Misi adalah:

- Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja
- Melaksanakan Pengendalian Belanja Sesuai Dengan Perencanaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun **tujuan** yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) di BKAD
2. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun sasaran merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3 Program Dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Program kerja BKAD Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BKAD Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah :
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 3 Program meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD memiliki 3 Program 13 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh PD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 berdasarkan strategi dan kebijakan, ada sebanyak 3 Program dan 12 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan Rencana Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. **356,535,005,632** yang bersumber dari dana APBD.

Sementara pada Tahun 2023 ada sebanyak 3 Program dan 12 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 337,089,329,582 Dari jumlah dana tersebut terealisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 81.714.621.958 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 24.24 %.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2024. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Indragiri Hilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							383.307.839.000,00						351.275.051.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						383.307.839.000,00							351.275.051.000,00		
	5.02	KEUANGAN						383.307.839.000,00							351.275.051.000,00		
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>	100 %				100 %	20.639.628.000,00					100 %	18.795.265.000,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>[deleted] Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun</i>	100 Persen				100 Persen	65.584.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	55.048.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen				2 Dokumen	27.992.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	2 Dokumen	23.592.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	216 Laporan			1 Laporan	37.592.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	72 Laporan	31.456.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar</i>	100 Persen			100 Persen	11.753.982.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	12.570.783.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	300 Orang/bulan			64 Orang/bulan	11.731.492.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Orang/bulan	12.552.696.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	180 Laporan			60 Laporan	22.490.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	60 Laporan	18.087.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi</i>	100 Persen			100 Persen	393.607.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	275.245.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	72 Orang			24 Orang	271.920.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	24 Orang	157.283.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	300 Orang			100 Orang	121.687.300,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Orang	117.962.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik</i>	100 Persen			100 Persen	3.084.725.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	2.571.581.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	33 Paket			11 Paket	114.500.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	11 Paket	117.962.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	18 Paket			6 Paket	500.240.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	6 Paket	393.208.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	15 Paket			5 Paket	104.350.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	5 Paket	117.962.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	18 Paket			6 Paket	349.500.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	6 Paket	275.246.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	33 Paket			11 Paket	76.000.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	11 Paket	78.641.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	9600 Dokumen			3200 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	3200 Dokumen	15.727.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	300 Laporan			1 Laporan	1.910.135.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Laporan	1.572.835.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	105.350.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	117.962.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	6 Unit			2 Unit	105.350.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	2 Unit	117.962.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor</i>	100 Persen			100 Persen	662.746.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	530.829.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	300 Laporan			1 Laporan	21.950.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Laporan	19.659.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	9 Laporan			3 Laporan	248.000.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	3 Laporan	196.604.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			4 Laporan	392.796.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	4 Laporan	314.566.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	4.573.633.700,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	2.673.817.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	300 Unit			40 Unit	1.959.150.100,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Unit	707.775.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	100 Unit			4 Unit	2.031.294.600,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Unit	786.417.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	300 Unit			1 Unit	206.189.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Unit	786.417.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	300 Unit			158 Unit	377.000.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Unit	393.208.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu</i>	100 %			100 %	358.371.103.682,00						100 %	329.609.365.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	2.362.404.950,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	1.494.190.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	158.852.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	2 Dokumen	78.641.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	157.023.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	2 Dokumen	78.641.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD															
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	24 Dokumen			8 Dokumen	1.125.170.650,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	8 Dokumen	786.417.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD															
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	556.674.300,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	2 Dokumen	393.208.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran															
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	15 Dokumen			5 Dokumen	364.685.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	5 Dokumen	157.283.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		<i>Persentase Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Belanja dan Pembiayaan Daerah di Dalam APBD</i>	100 Persen			100 Persen	2.466.992.482,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	2.044.683.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya															

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>			29 Dokumen	456.254.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL		393.208.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>	72 Laporan		24 Laporan	665.259.982,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	24 Laporan	550.492.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	576.173.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	2 Dokumen	471.850.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan															
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	769.305.500,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	1 Dokumen	629.133.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>		100 Persen			100 Persen	2.701.383.350,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	1.494.191.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran															
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	12 Laporan			4 Laporan	307.339.500,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	4 Laporan	157.283.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															

			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	6 Laporan			2 Laporan	1.416.009.450,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	2 Laporan	786.417.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	12 Dokumen			4 Dokumen	699.593.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	4 Dokumen	393.208.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah															
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	278.441.400,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	1 Dokumen	157.283.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		<i>Bagi hasil kabupaten/kota dan desa</i>	100 Persen			100 Persen	350.194.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	324.065.130.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan															

			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	3 Laporan			1 Laporan	294.843.000.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	1 Laporan	285.218.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	1 Laporan	30.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	3 Laporan			1 Laporan	5.351.000.000,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	1 Laporan	8.847.130.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		<i>Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikelola</i>	100 Persen			100 Persen	646.322.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	511.171.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	646.322.900,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	2 Dokumen	511.171.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

3,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>[deleted] [deleted]1 Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu [deleted]</i>	100 %			100 % 100 %	4.297.107.318,00					100 %	2.870.421.000,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase Rekonsiliasi Pemutakhiran Pencatatan dan Pelaporan BMD</i>	100 Persen			100 Persen	4.297.107.318,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	100 Persen	2.870.421.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	554.482.400,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	2 Dokumen	747.096.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	30 Laporan			10 Laporan	422.729.200,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	10 Laporan	157.283.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	12 Laporan			4 Laporan	1.454.697.648,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	4 Laporan	1.061.663.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	594.287.500,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	2 Dokumen	235.925.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	30 Laporan			10 Laporan	993.847.300,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	10 Laporan	471.850.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	9 Orang			3 Orang	277.063.270,00	- Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	BKAD KAB. INHIL	3 Orang	196.604.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
J U M L A H								383.307.839.000,00							351.275.051.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang dioperasionalkan melalui rencana pembangunan daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual, penerapan teknologi informasi dengan diterapkannya intergrasi e-planning dan e-budgeting, pengintegrasian standar satuan harga dengan satuan harga online, dan integrasi pembayaran non tunai dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi secara online.
3. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BKAD Kabupaten Indragiri Hilir secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Indragiri Hilir, 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



NURRAHMAN. SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19791223 199905 1 001

